

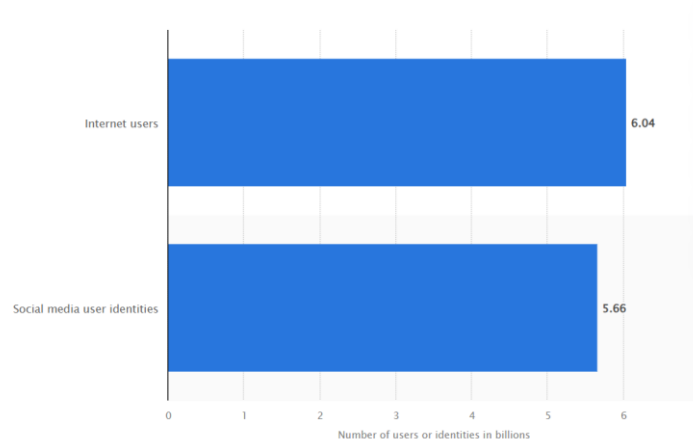
# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dinamika politik global dalam era globalisasi telah mendorong perubahan fundamental dalam studi Hubungan Internasional. Globalisasi tidak hanya meningkatkan intensitas interaksi lintas batas, tetapi juga mendorong transformasi dalam struktur dan mekanisme politik internasional (Fajria & Rizqi, 2019). Dalam perspektif klasik yang bersifat *state-centric*, negara diposisikan sebagai aktor utama yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan perang dan perdamaian (Yuliestiana et al., 2018). Namun, dalam konteks perspektif kontemporer, globalisasi telah memperluas spektrum isu dan aktor yang berperan dalam hubungan internasional (Hamonangan, 2020). Keterlibatan aktor lintas negara yang semakin menonjol dalam membentuk agenda dan tekanan politik internasional menunjukkan bahwa pendekatan *state-centric* semakin menghadapi keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas realitas politik global saat ini (Fajria & Rizqi, 2019).

Seiring dengan proses globalisasi tersebut, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mendorong perubahan sosial yang signifikan pada skala global, terutama melalui percepatan arus informasi dan integrasi lintas batas negara. Teknologi digital menciptakan pola interaksi sosial dan politik yang berbeda dari hubungan *face-to-face* konvensional, di mana ruang digital menjadi arena baru bagi pembentukan opini publik dan mobilisasi kolektif (Rianto, 2008). Data global menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 jumlah pengguna internet dunia telah mencapai lebih dari 6 miliar orang, sementara jumlah identitas pengguna media sosial global telah melampaui 5,6 miliar, yang merepresentasikan lebih dari dua per tiga populasi dunia (Statista Research Departments, 2025). Tingginya penetrasi internet dan media sosial ini menciptakan infrastruktur komunikasi digital yang memungkinkan interaksi berlangsung secara *real time* tanpa dibatasi oleh batas geografis (Bumbungan, 2025).



**Gambar 1.1 Data Pengguna Internet dan Media Sosial**

Sumber: Statista

Keberadaan infrastruktur digital tersebut menjadikan media sosial sebagai sarana mobilisasi yang sangat penting dalam dinamika politik global. Media sosial menawarkan jangkauan, kecepatan dan efisiensi dalam penyebaran informasi, pembentukan kesadaran bersama, serta mobilisasi dukungan publik dalam isu sosial dan politik (Nugroho, 2025). Dalam konteks ini, individu dan berbagai aktor non-negara, seperti organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, serta komunitas transnasional memperoleh ruang yang semakin luas untuk berinteraksi lintas negara dan membangun gerakan sosial transnasional yang terorganisir untuk mengadvokasi isu-isu non-tradisional seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, lingkungan, hingga krisis kemanusiaan (Indira Aryani et al., 2023).

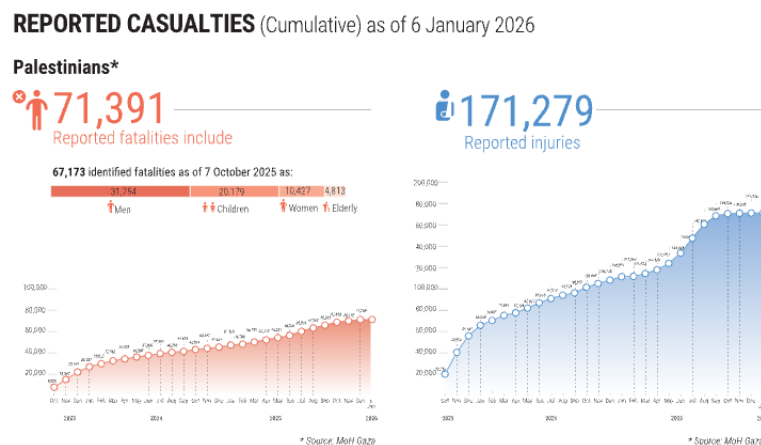
Melalui platform digital seperti Twitter/X, Instagram, TikTok, hingga aplikasi komunitas penggemar global seperti Weverse, proses penyebaran informasi, mobilisasi dukungan, pertukaran pandangan politik, pengorganisasian protes, serta pembentukan solidaritas digital dapat berlangsung secara cepat dan masif. Media sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai infrastruktur politik transnasional yang memungkinkan aktor non-negara untuk berkoordinasi lintas batas secara *real time*. Kondisi tersebut mendorong munculnya gerakan sosial global yang dimobilisasi oleh aktor-aktor non-negara, termasuk masyarakat sipil dan komunitas digital, yang berfokus pada advokasi isu-isu non-tradisional, guna memengaruhi opini publik dan kebijakan publik (Rachimoellah et al., 2024).

Salah satu manifestasi nyata dari gerakan sosial transnasional kontemporer yang memanfaatkan jaringan komunikasi global, media sosial dan koordinasi lintas batas adalah gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS). Gerakan ini diinisiasi pada tahun 2005 oleh lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina, sebagai respons terhadap pendudukan Israel di wilayah Palestina serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional (Rusmayani, n.d.). Sejak awal kemunculannya, gerakan ini dirancang sebagai gerakan advokasi lintas batas negara yang bertumpu pada mobilisasi aktor non-negara dan solidaritas global untuk memberikan tekanan ekonomi, politik, dan moral terhadap Israel (Fadya et al., 2024).

Gerakan BDS memiliki tiga tuntutan utama yang menjadi landasan operasionalnya. Pertama, mengakhiri pendudukan Israel sejak 1967. Kedua, pembongkaran sistem dominasi dan diskriminasi rasial yang terinstitusi dan dilegalkan, yang memenuhi definisi *apartheid* menurut PBB. Ketiga, menegakkan hak pengungsi Palestina yang diakui secara internasional untuk kembali ke rumah dan tanah mereka yang telah dirampas dan digusur sejak pembersihan etnis massal 1947-1948, atau Nakba (Barghouti, 2021).

Gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* beroperasi melalui tiga instrumen tekanan utama terhadap Israel dan aktor yang terafiliasi. Pertama, boikot (*boycott*) terhadap produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan Israel maupun perusahaan multinasional yang dianggap terafiliasi dan mendukung kebijakan pendudukan Israel. Kedua, divestasi (*divestment*), yaitu mendorong lembaga keuangan, institusi publik, dan aktor ekonomi global untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pendudukan wilayah Palestina. Ketiga, sanksi (*sanctions*), dengan menyerukan penerapan sanksi internasional terhadap Israel hingga negara tersebut mematuhi hukum internasional dan menghormati hak-hak rakyat Palestina (BDS National Committee, n.d.-b). Melalui ketiga instrumen tersebut, gerakan BDS membangun koalisi masyarakat sipil global yang mengoordinasikan aksi kolektif lintas negara dan lintas sektor, sehingga menjadikan BDS sebagai contoh konkret gerakan sosial global yang berupaya memengaruhi praktik dan kebijakan aktor negara maupun non-negara dalam tatanan politik global (Fadya et al., 2024).

Meskipun gerakan BDS telah hadir sejak tahun 2005, momentum gerakan ini mengalami putaran signifikan pasca eskalasi konflik Israel-Palestina yang mencapai titik kritisnya pada 7 Oktober 2023. Serangan yang diluncurkan oleh Hamas memicu operasi militer balasan dari pihak Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung secara intensif dan berkelanjutan (Ramadhan, 2024). Menurut laporan Kementerian Kesehatan di Gaza, seperti yang dilaporkan oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA, 2026), rincian korban jiwa yang telah diidentifikasi sepenuhnya antara tanggal 7 Oktober 2023 dan 6 Januari 2026, dilaporkan ada 71,391 warga Palestina yang tewas di Jalur Gaza dan 171,279 lainnya terluka, dengan sebagian besar korban berasal dari kalangan sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Selain tingginya angka korban, konflik ini juga menyebabkan kelumpuhan stabilitas di wilayah terdampak, karena kehancuran masif terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, yang diperparah oleh pemblokiran akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza (Ramadhan, 2024).



**Gambar 1.2 Jumlah Korban Jiwa dan Luka-luka di Jalur Gaza**

Sumber: *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*

Pemberitaan mengenai krisis kemanusiaan di Palestina yang tersebar masif melalui media sosial, membuat masyarakat global menilai serangan balik tersebut sebagai upaya sistematis untuk menghilangkan dan/atau penghapusan etnis tertentu (Nurfaedah et al., 2025). Persebaran informasi mengenai situasi yang terjadi di Palestina, memicu gelombang solidaritas global melalui media sosial yang berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis kemanusiaan di Palestina dan mengutuk tindakan agresi pemerintah Israel

(Meiliani et al., 2024). Pasca Oktober 2023, gerakan BDS menunjukkan peningkatan signifikan dalam skala dan visibilitas mobilisasi digital, yang ditandai dengan melonjaknya kampanye boikot di media sosial, peningkatan penggunaan tagar terkait BDS dan Palestina, serta meluasnya partisipatif masyarakat global dalam seruan boikot terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang dianggap terafiliasi dan/atau mendukung pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Penggunaan *hashtag*, *retweet/repost*, unggahan *story* dan *mention* yang terkait dengan isu tersebut merupakan contoh aksi nyata dari gerakan sosial yang memperoleh daya tarik global melalui platform media sosial (Wahyuddin et al., 2024).

Mobilisasi massal melalui media sosial tidak hanya memperluas jangkauan geografis gerakan BDS, tetapi juga memperluas spektrum target dan aktor yang terlibat dalam gerakan ini. Gelombang gerakan BDS pasca Oktober 2023 tidak hanya menasar sektor ekonomi dan politik konvensional, namun juga merambah ke berbagai bidang, termasuk bidang hiburan dan budaya populer. Boikot budaya yang dipelopori oleh *Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel* (PACBI), menargetkan industri hiburan maupun institusi yang terlibat dengan Israel sebagai tanggapan atas keterlibatan individu maupun industri hiburan terhadap kejahatan perang atau pelanggaran hukum internasional lainnya (BDS National Committee, n.d.-a).

Menurut laporan yang dilansir oleh *Associated Press News* dan *Canadians for Justice and Peace in the Middle East* (CJPME), Starbucks menjadi salah satu target merek multinasional yang harus diboikot karena dukungannya terhadap Israel dan keterlibatannya dalam pendudukan Israel, terkhusus setelah Starbucks mengambil tindakan hukum terhadap *Starbucks Workers United* atas unggahan solidaritasnya dengan Palestina, yang dipersepsikan sebagai bentuk dukungannya terhadap Israel (*Starbucks and The Boycott of Israel*, 2024). Meskipun Starbucks tidak termasuk dalam daftar boikot resmi yang dikelola oleh gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS), seruan boikot terhadap Starbucks tersebar di berbagai platform digital dan mencapai komunitas-komunitas transnasional yang sebelumnya tidak dikenal sebagai aktor politik, seperti fandom K-Pop (Durbin, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik boikot kontemporer tidak lagi

terbatas pada aktor politik formal seperti negara, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, melainkan melibatkan aktor non-negara berbasis budaya populer yang memiliki kapasitas mobilitas digital yang signifikan (Ulfa & Prianti, 2025).

Dalam konteks ini, industri hiburan Korea Selatan, khususnya K-Pop, merupakan salah satu fenomena budaya populer global berupa musik, konten visual, dan ekonomi dengan jangkauan transnasional yang terhubung melalui media sosial. Popularitas ini disertai dengan penggemar K-Pop yang mendominasi media sosial, terutama Twitter, sebagai sarana komunikasi dan membentuk komunitas. Penggemar K-Pop memiliki cara tersendiri untuk mendukung idola dan menyebarkan budaya fandom. Para penggemar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, seperti mempromosikan lagu baru BTS “Butter”, yang mencapai lebih dari 108 juta *views* di YouTube. Fenomena ini menjelaskan bagaimana penggemar K-Pop, sebagai bagian dari komunitas sipil digital yang terorganisir, dapat bertransformasi menjadi kekuatan kolektif dalam dinamika politik di platform digital (Septiani, 2025).

Keberhasilan popularitas budaya populer Korea Selatan ini tidak akan terjadi tanpa penggemarnya, yang dikenal sebagai salah satu yang paling aktif dan ‘obsesif’ terhadap idola Korea mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, penggemar K-Pop telah menunjukkan transformasi dari komunitas konsumen hiburan menjadi aktor kolektif lintas batas yang memiliki kapabilitas mobilisasi massal. Penggemar K-Pop atau biasa dikenal sebagai fandom K-Pop, tidak lagi dipandang dengan stereotip “fanatik” dan “kelompok remaja yang berteriak-teriak” (Andini & Akhni, 2021). Fandom K-Pop kini dikenal sebagai komunitas terorganisir yang mampu memanfaatkan digitalisasi untuk advokasi politik. Melalui platform media sosial seperti Twitter/X, Weverse, dan Instagram, fandom K-Pop telah mengasah kemampuan koordinasi lintas batas untuk mendukung *comeback* idol hingga penggalangan dana untuk tujuan amal. Kemampuan organisasi digital ini kemudian ditransfer ke dalam aktivisme politik, di mana fandom menggunakan taktik yang sama untuk mengadvokasi isu-isu global seperti gerakan *Black Lives Matter* dan kampanye lingkungan (P. Kim & Hutt, 2021). Dalam penelitian ini, fandom beroperasi untuk menyerukan aksi gerakan BDS untuk Palestina. Fenomena ini menunjukkan bagaimana fandom yang secara konvensional dipandang sebagai

konsumen pasif budaya populer yang bertransformasi menjadi bagian dari gerakan sosial global yang aktif mengadvokasi isu-isu kemanusiaan lintas batas negara (Mulyana & Wahyuningroem, 2025).

Manifestasi nyata dari kekuatan kolektif fandom K-Pop dapat terlihat dalam dinamika industri K-Pop di Korea Selatan pasca Oktober 2023, khususnya melalui aksi protes terhadap keterkaitan idol dan agensi hiburan dengan merek Starbucks (KoreaBoo, 2024a). Dalam konteks penelitian ini, Starbucks diposisikan sebagai target empiris yang relevan untuk menganalisis bagaimana fandom K-Pop global mengoperasikan tekanan moral dan mobilisasi digital dalam kerangka gerakan BDS. Pemilihan ini memungkinkan penelitian untuk menjelaskan dinamika interaksi antara fandom global, industri hiburan Korea Selatan, dan merek sebagai cerminan dari gerakan sosial global kontemporer.

Relevansi empiris dari pemilihan Starbucks sebagai target dalam penelitian ini tercermin secara konkret dalam dua peristiwa utama di industri K-Pop Korea Selatan pasca Oktober 2023, yang menunjukkan bagaimana tekanan moral dan mobilisasi fandom beroperasi dalam praktik. Pada Januari 2024, Jake dari grup ENHYPEN memicu kontroversi ketika ia terlihat meminum Starbucks saat *live streaming* di platform Weverse. Insiden ini memicu reaksi masif dari fandom ENGENE internasional yang kemudian menyebarkan informasi mengenai alasan boikot Starbucks dan menuntut Jake untuk mengambil sikap terhadap isu BDS. Reaksi keras dari fandom internasional yang menuntut permintaan maaf dan mengedukasi Jake mengenai gerakan BDS mencerminkan bagaimana fandom beroperasi sebagai komunitas sipil digital yang secara aktif membangun kesadaran kolektif atas isu-isu kemanusiaan global (Sumadi & Badaruddin, 2025).

Dinamika aktivisme fandom ini kemudian mengalami eskalasi ketika tekanan tidak lagi diarahkan pada tindakan individu idola, melainkan beralih ke level institusional melalui kebijakan dan kolaborasi resmi agensi hiburan. Kolaborasi resmi antara grup NCT (*Neo Culture Technology*) dengan Starbucks memicu gelombang protes masif dari fandom NCTzen global. Melalui kampanye digital yang terorganisir di platform Twitter/X, NCTzen tidak hanya mengungkapkan ketidaksetujuannya, tetapi juga berpartisipasi dalam aksi protes yang lebih konkret seperti *unfollow* massal akun resmi terkait NCT dan SM Entertainment, hingga

pengiriman truk protes. Tanggapan terhadap kolaborasi NCT dan Starbucks tidak hanya diwujudkan melalui penolakan verbal, tetapi juga melalui ekspresi digital kreatif. Kedua kasus ini menunjukkan pola bagaimana fandom K-Pop global, sebagai bagian dari gerakan sosial global yang dimobilisasi secara digital, mampu memberikan tekanan kolektif kepada idol, agensi, dan merek di Korea Selatan untuk menyelaraskan kebijakan mereka dengan isu-isu kemanusiaan global (Malika & Kusuma, 2025).

Kajian mengenai gerakan BDS maupun aktivisme fandom K-Pop secara masing-masing telah mendapat perhatian yang cukup luas dalam berbagai literatur, baik dalam studi gerakan sosial, komunikasi digital, maupun budaya populer. Namun, kedua fenomena tersebut jarang dianalisis secara bersamaan sebagai satu kesatuan dinamika dalam kerangka politik internasional. Penelitian yang ada cenderung menempatkan aktivisme fandom sebatas pada dimensi budaya partisipatif dan interaksi digital, tanpa menelaah lebih jauh bagaimana komunitas sipil digital seperti fandom mampu beroperasi sebagai bagian dari gerakan sosial global yang berupaya memengaruhi praktik dan kebijakan aktor-aktor di luar batas negaranya. Celah inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Dinamika BDS dalam industri K-Pop Korea Selatan, khususnya bagaimana fandom merespons, memobilisasi, dan menekan idol serta agensi hiburan atas isu kemanusiaan global, belum banyak ditelaah sebagai fenomena politik internasional yang melibatkan mobilisasi kolektif komunitas sipil digital lintas batas. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis peran fandom K-Pop global sebagai komunitas sipil digital dalam gerakan sosial global BDS terhadap Starbucks di Industri K-Pop Korea Selatan, dengan fokus pada kasus Jake ENHYPEN dan NCT. Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Fandom K-Pop dan Gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) Terhadap Starbucks di Industri K-Pop Korea Selatan.**

## 1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fandom K-Pop global beroperasi sebagai komunitas sipil digital dalam gerakan BDS terhadap Starbucks di industri K-Pop Korea Selatan?
2. Strategi digital apa yang digunakan fandom untuk menekan idol, agensi, dan merek di Korea Selatan dalam konteks gerakan BDS?
3. Bagaimana respons idol dan agensi hiburan Korea Selatan terhadap tekanan kolektif fandom K-Pop global dalam konteks gerakan BDS terhadap Starbucks?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini tidak membahas pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini akan dibatasi pada kajian terhadap Starbucks sebagai merek multinasional yang menjadi target gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS), dengan pertimbangan bahwa Starbucks memiliki keterkaitan nyata dengan industri K-Pop melalui kolaborasi dengan idola K-Pop serta memicu respons kolektif dari fandom. Penelitian ini secara khusus berfokus pada fandom NCT (NCTzen) dan fandom ENHYPEN (ENGENE), mengingat adanya respons terdokumentasi yang berbeda dari kedua fandom tersebut—NCTzen merespons kolaborasi resmi antara NCT dan Starbucks, sementara ENGENE merespons insiden tidak sengaja anggota ENHYPEN, Jake, yang terlihat mengonsumsi produk Starbucks saat *live streaming*. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aktivisme fandom di media sosial sebagai arena utama mobilisasi dan aksi boikot, tanpa membahas secara mendalam kebijakan internal maupun strategi manajerial Starbucks. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada rentang waktu 2023-2024, yaitu periode ketika eskalasi konflik Israel-Palestina mendorong intensifikasi gerakan BDS dan memunculkan dinamika aktivisme fandom K-Pop yang signifikan di ruang digital. Selain itu, penelitian ini membatasi analisis advokasi fandom di ruang digital.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana fandom K-Pop global beroperasi sebagai komunitas sipil digital dalam gerakan BDS terhadap Starbucks di Industri K-Pop Korea Selatan.
2. Untuk menjelaskan strategi digital yang digunakan fandom K-Pop untuk menekan idol, agensi, dan merek di Korea Selatan dalam konteks gerakan BDS.
3. Untuk menganalisis respons idol dan agensi hiburan Korea Selatan terhadap tekanan kolektif fandom K-Pop global dalam konteks gerakan BDS terhadap Starbucks.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, mengembangkan keterampilan analisis, penelitian, dan penulisan akademis yang penting dalam penyelesaian tugas akhir dan persiapan memasuki dunia profesional.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian gerakan sosial global dalam studi Hubungan Internasional, khususnya terkait peran komunitas sipil digital sebagai aktor non-negara dalam isu kemanusiaan, serta memperkaya literatur mengenai *fan activism* sebagai fenomena politik yang memiliki dimensi sosial, budaya dan internasional.
3. Sebagai prasyarat kelulusan menempuh program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan dan memberikan informasi akademisi untuk mengangkat topik penelitian yang sama sehingga mampu menjadi referensi bagi pengembangan topik penelitian serupa.

## 1.5 Kerangka Teoritis/Konseptual

### 1.5.1 *Global Civil Society*

Teori *Global Civil Society* atau masyarakat sipil global memberikan kerangka analitis untuk memahami peran aktor non-negara beroperasi melampaui batas teritorial negara dalam memperjuangkan isu-isu global. Kaldor (2003) mendefinisikan *civil society* sebagai proses ketika individu-individu bernegosiasi, berdebat, berjuang, dan bersepakat dengan pusat-pusat otoritas politik maupun ekonomi melalui asosiasi sukarela, gerakan, partai, serikat, maupun komunitas, sehingga mereka dapat bertindak secara publik. Dalam perkembangannya, *civil society* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai fenomena domestik yang terikat pada negara-bangsa, melainkan telah memperoleh makna global melalui jaringan lintas negara, komunitas, dan solidaritas transnasional yang saling mendukung.

Menurut Kaldor (2003), *global civil society* berkembang ke dalam tiga versi, yaitu *activist version*, *neoliberal version*, dan *postmodern version*. *Activist version* merujuk pada jaringan aktivis transnasional yang bergerak atas isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan. *Neoliberal version* lebih menekankan peran organisasi non-pemerintah yang terlembagakan dan cenderung menjadi mitra formal dalam agenda pembangunan dan reformasi pasar. Sementara itu, *postmodern version* melihat *global civil society* sebagai ruang yang juga dapat diisi oleh gerakan berbasis identitas, budaya, dan kelompok non-Barat. Dari ketiga versi tersebut, penelitian ini menggunakan *activist version* karena paling relevan untuk menjelaskan gerakan fandom K-Pop yang bergerak secara kolektif dalam isu BDS.

Relevansi kerangka teori *global civil society* dengan penelitian ini karena fandom K-Pop global menunjukkan karakter yang serupa dengan masyarakat sipil global, yakni sebagai komunitas transnasional yang mampu memobilisasi dukungan, menyebarkan informasi, dan membangun tekanan kolektif terhadap aktor yang menjadi target gerakan. Dalam konteks gerakan BDS terhadap Starbucks, fandom tidak hanya berperan sebagai kelompok penggemar, tetapi juga sebagai aktor kolektif yang menggunakan ruang

digital untuk menyampaikan sikap politik dan moral terhadap isu Palestina. Dinamika ini menunjukkan bahwa fandom K-Pop telah bertransformasi menjadi bagian dari masyarakat sipil global dalam gerakan sosial lintas batas negara.

Pemilihan teori *global civil society* dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaiannya dalam menjelaskan peran fandom K-Pop sebagai aktor non-negara yang bergerak secara transnasional dan melampaui batas-batas geografis negara. Dari ketiga versi yang dijelaskan Kaldor, *activist version* paling tepat digunakan karena penelitian ini menyoroti mobilisasi kolektif fandom yang berfokus pada isu kemanusiaan global melalui ruang digital. Teori ini juga memungkinkan penelitian ini untuk melihat bahwa gerakan fandom bukan sekadar bentuk ekspresi dukungan terhadap idola, melainkan bagian dari praktik kolektif yang berorientasi pada isu sosial dan kemanusiaan global. Dengan demikian, teori ini dianggap paling tepat untuk menjelaskan peran fandom K-Pop beroperasi sebagai komunitas sipil digital yang mampu memberikan tekanan terhadap idol, agensi, dan korporasi dalam konteks gerakan BDS terhadap Starbucks di industri K-Pop Korea Selatan.

### **1.5.2 Global Social Movements**

Konsep *Global Social Movements* atau gerakan sosial global memberikan kerangka analitis untuk memahami pola mobilisasi kolektif aktor non-negara berkembang dan beroperasi melampaui batas negara, serta berinteraksi dengan struktur tata kelola global. Dalam dinamika globalisasi, gerakan sosial tidak hanya berfokus pada perubahan di tingkat nasional, tetapi juga berupaya memengaruhi praktik, norma, dan kebijakan di tingkat internasional (Bennett, 2012). Dalam konteks ini, gerakan sosial global menjadi bagian penting dalam *global civil society* karena memperlihatkan bagaimana aktor-aktor non-negara membangun solidaritas, menyebarkan wacana normatif, dan membentuk tekanan kolektif terhadap aktor berkuasa melalui ruang publik transnasional.

Relevansi kerangka konseptual gerakan sosial transnasional dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) beroperasi sebagai mobilisasi kolektif lintas negara yang berupaya memengaruhi praktik dan kebijakan korporasi global. Dalam konteks industri K-Pop Korea Selatan, keterlibatan fandom K-Pop sebagai aktor non-negara menunjukkan bahwa gerakan sosial global tidak hanya beroperasi melalui aktor formal, tetapi juga melalui komunitas budaya populer seperti fandom di ruang digital. Fandom tidak hanya berfungsi sebagai komunitas penggemar, tetapi juga sebagai bagian dari *global civil society* yang memobilisasi solidaritas global, membangun tekanan normatif, dan menantang relasi kekuasaan dalam politik global.

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual gerakan sosial global untuk menjelaskan bagaimana fandom K-Pop beroperasi sebagai bagian dari *global civil society* yang aktif dalam isu BDS. Kerangka ini kemudian dilengkapi oleh konsep-konsep pendukung yang membantu untuk menjelaskan proses mobilisasi dan karakter partisipan dalam gerakan tersebut.

### ***1.5.3 Digital Activism***

Konsep *digital activism* atau aktivisme digital memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana aktor non-negara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, sebagai sarana mobilisasi politik dan advokasi dalam konteks global. Aktivisme digital merepresentasikan bentuk partisipasi politik kontemporer yang memungkinkan individu maupun kelompok masyarakat sipil untuk memfasilitasi komunikasi, memobilisasi massa, dan menyebarkan informasi secara cepat melalui ruang digital. Dalam politik global, aktivisme digital berfungsi sebagai medium penting yang menghubungkan isu-isu lokal dengan audiens internasional, sekaligus memperluas ruang partisipasi politik di luar mekanisme formal yang kaku (Rachimoellah et al., 2024).

Dalam perkembangannya, aktivisme digital menjadi bagian penting dari praktik gerakan sosial global karena media digital memungkinkan proses

mobilisasi, koordinasi, dan distribusi informasi dilakukan secara lebih luas dan efisien. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang produksi narasi, pembentukan opini publik, serta konsolidasi solidaritas transnasional. Melalui media digital, aktor-aktor non-negara dapat membangun jaringan komunikasi lintas negara yang memungkinkan isu tertentu memperoleh perhatian global dalam waktu singkat (Rachimoellah et al., 2024).

Relevansi konsep aktivisme digital dalam penelitian ini terletak pada penggunaan media sosial seperti Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, serta platform komunitas penggemar seperti Weverse oleh fandom K-Pop dalam menyebarkan informasi terkait gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS). Dalam konteks industri hiburan Korea Selatan, media sosial menjadi arena utama bagi fandom K-Pop untuk mengampanyekan isu kemanusiaan Palestina, mengedukasi penggemar lain mengenai afiliasi korporasi tertentu, serta mengoordinasikan aksi kampanye boikot terhadap merek global seperti Starbucks. Aktivisme digital memungkinkan fandom K-Pop bertransformasi dari komunitas budaya populer menjadi aktor kolektif dalam gerakan sosial global yang mampu membangun solidaritas global dan menciptakan tekanan publik terhadap idol, agensi hiburan, maupun korporasi yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Dengan demikian, konsep aktivisme digital membantu menjelaskan mekanisme mobilisasi, penyebaran informasi, dan pembentukan tekanan normatif yang berlangsung dalam ruang digital pada gerakan BDS yang melibatkan fandom K-Pop.

#### **1.5.4 Fan Activism**

Konsep *fan activism* atau aktivisme penggemar memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana fandom beroperasi tidak hanya konsumen budaya populer, tetapi juga sebagai komunitas partisipatif yang mampu membangun keterlibatan sosial dan politik. Dalam perkembangannya, praktik fandom tidak lagi terbatas pada aktivitas konsumsi budaya, melainkan berkembang menjadi bentuk partisipasi kolektif yang memanfaatkan identitas, solidaritas, dan jaringan komunitas penggemar

untuk mendukung isu-isu sosial tertentu. Jenkins, sebagaimana dikutip dalam Kligler-Vilenchik et al., (2012), mendefinisikan aktivisme penggemar sebagai:

*“forms of civic engagement and political participation that emerge from within fan culture itself, often in response to the shared interests of fans, often conducted through the infrastructure of existing fan practices and relationships, and often framed through metaphors drawn from popular and participatory culture”.*

Definisi tersebut menunjukkan bahwa aktivisme penggemar berkembang dari praktik budaya partisipatif yang telah terbentuk dalam komunitas fandom, kemudian digunakan untuk memobilisasi keterlibatan sipil dan politik. Dalam konteks ini, fandom mampu mengidentifikasi isu, menyusun strategi mobilisasi, serta memengaruhi anggotanya untuk terlibat dalam gerakan sosial yang terorganisir, khususnya pada isu-isu normatif seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial (Kligler-Vilenchik et al., 2012).

Relevansi konsep aktivisme penggemar dalam penelitian ini terletak pada kemampuan fandom K-Pop dalam memobilisasi komunitas penggemar untuk mendukung gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions*. Melalui media sosial dan jaringan fandom digital, penggemar K-Pop memanfaatkan praktik partisipatif yang telah menjadi budaya fandom, seperti penyebaran informasi, koordinasi massa daring, dan kampanye kolektif, untuk menyuarakan solidaritas terhadap Palestina serta menekan aktor-aktor yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Dalam konteks ini, fandom tidak hanya memproduksi identitas budaya populer, tetapi juga membangun kesadaran politik dan solidaritas transnasional melalui aktivitas kolektif berbasis komunitas penggemar. Dengan demikian, konsep *fan activism* membantu menjelaskan bagaimana fandom K-Pop bertransformasi menjadi aktor kolektif yang memiliki kapasitas mobilisasi politik dalam isu global melalui praktik budaya partisipatif yang mereka miliki.

## 1.6 Asumsi/Hipotesis Penelitian

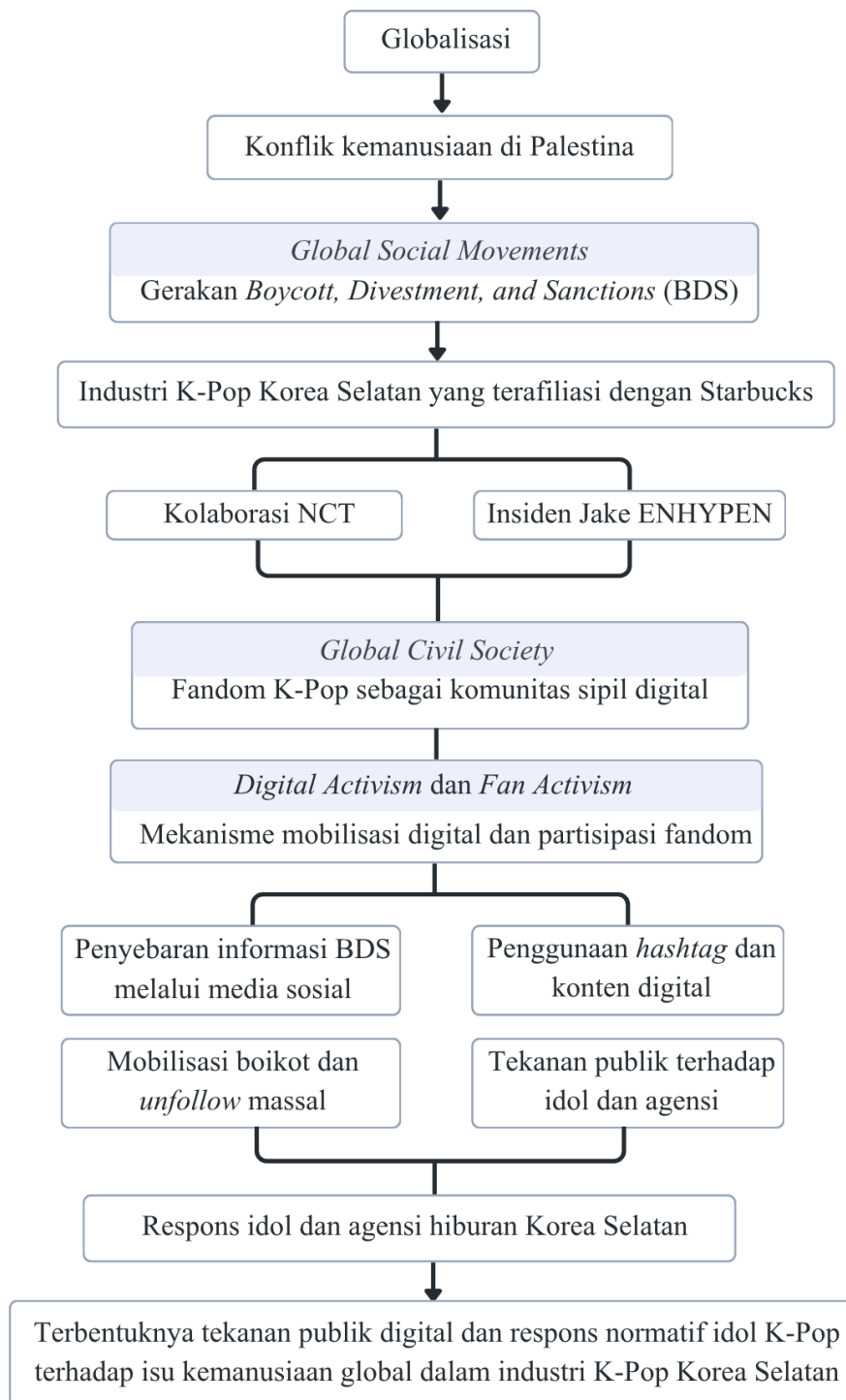
Asumsi penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa aktor non-negara memiliki peran penting dalam merespons isu-isu kemanusiaan global, terutama ketika mekanisme negara dan institusi formal internasional belum mampu memberikan respons yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia lintas batas. Dalam konteks ini, gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) terhadap Starbucks di industri K-Pop Korea Selatan dipahami sebagai bagian dari *global civil society* dan *global social movements* yang berupaya membangun solidaritas transnasional serta menciptakan tekanan normatif terhadap aktor-aktor global melalui mobilisasi kolektif lintas negara. Gerakan tersebut tidak hanya melibatkan organisasi formal, tetapi juga komunitas masyarakat sipil dan kelompok budaya populer yang terhubung melalui jaringan global.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa fandom K-Pop seperti NCTzen dan ENGENE dapat berfungsi sebagai bagian dari *global civil society* yang terlibat dalam gerakan sosial global melalui praktik *digital activism* dan *fan activism*. Melalui media sosial dan platform digital, fandom K-Pop memiliki kapasitas untuk menyebarkan informasi, membangun solidaritas internasional, mengkonsolidasikan opini publik, serta memobilisasi partisipasi kolektif dalam mendukung kampanye BDS terhadap Starbucks di industri K-Pop Korea Selatan. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa ruang digital memungkinkan fandom untuk melampaui fungsi tradisional sebagai komunitas penggemar dan bertransformasi menjadi aktor kolektif yang terlibat dalam mengampanyekan isu kemanusiaan global.

Selain itu, penelitian ini juga berasumsi bahwa praktik *fan activism* memungkinkan fandom memanfaatkan identitas dan budaya partisipatif yang telah terbentuk dalam komunitas penggemar sebagai basis mobilisasi politik dan solidaritas transnasional. Dalam konteks ini, keterlibatan fandom dalam kampanye BDS dipengaruhi oleh kemampuan mereka memanfaatkan media digital untuk membangun kesadaran publik, memperluas penyebaran informasi tentang isu kemanusiaan Palestina, dan menciptakan tekanan publik terhadap idol, agensi hiburan, maupun korporasi yang dianggap memiliki afiliasi dengan Israel. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keterlibatan fandom K-Pop

dalam gerakan BDS merupakan bentuk partisipasi aktor non-negara dalam gerakan sosial global yang dimediasi oleh ruang digital dan budaya partisipatif fandom.

## 1.7 Kerangka Analisis



Kerangka analisis ini menjelaskan bagaimana globalisasi mendorong perubahan dalam struktur politik global yang ditandai dengan menguatnya peran aktor non-negara dalam isu-isu kemanusiaan lintas batas. Perubahan ini memperluas spektrum isu global sekaligus menantang dominasi negara sebagai aktor utama dalam politik internasional. Dalam konteks ini, konflik kemanusiaan di Palestina pasca serangan balik Israel pada 7 Oktober 2023 memicu eskalasi kekerasan dan krisis kemanusiaan berkepanjangan yang kemudian menimbulkan gelombang solidaritas global.

Salah satu bentuk solidaritas tersebut adalah gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS), yang dalam kerangka *Global Social Movements* dipahami sebagai mobilisasi kolektif aktor non-negara yang beroperasi melampaui batas negara untuk memengaruhi praktik, norma, dan kebijakan aktor-aktor berkuasa di tingkat internasional. Dalam perkembangannya, gerakan BDS merambah ke industri hiburan Korea Selatan melalui kampanye boikot terhadap Starbucks yang dianggap terafiliasi dengan Israel, memicu respons kolektif dari fandom K-Pop global, khususnya melalui kolaborasi NCT dengan Starbucks dan insiden Jake ENHYPEN.

Dalam kerangka *Global Civil Society*, fandom K-Pop diposisikan sebagai komunitas sipil digital yang beroperasi di luar struktur negara dan pasar, bergerak atas dasar nilai-nilai kemanusiaan bersama lintas batas negara. Melalui *Digital Activism* dan *Fan Activism*, fandom memanfaatkan infrastruktur digital dan praktik partisipatif yang telah terbentuk dalam budaya penggemar untuk memobilisasi keterlibatan politik. Mekanisme ini terwujud melalui penyebaran informasi BDS melalui media sosial, penggunaan *hashtag* dan konten digital, mobilisasi boikot dan *unfollow* massal, serta tekanan publik terhadap idol dan agensi hiburan.

Dengan demikian, kerangka analisis ini menyoroti bagaimana tekanan kolektif fandom K-Pop sebagai bagian dari gerakan sosial global yang dimediasi secara digital menghasilkan respons dari idol dan agensi hiburan Korea Selatan, serta terbentuknya tekanan publik digital dan respons normatif idol K-Pop terhadap isu kemanusiaan global dalam konteks industri hiburan Korea Selatan.